

TAJUK RENCANA

Waspada Investasi Fiktif

KASUS investasi fiktif yang melibatkan pegawai bank BUMN di Yogya, RL, cukup mengagetkan masyarakat. Petugas teller di bank plat merah itu telah dipecat dari institusinya. Ia telah meraup uang Rp 5,6 miliar dari 13 nasabahnya. Modusnya, RL menawarkan produk tabungan baru, yang bukan program resmi dari bank, dengan syarat setoran mengendap selama 1 tahun atau 6 bulan dengan jumlah setoran minimal Rp 100 juta. Kemudian nasabah dijanjikan bunga sekitar 1,5 persen setiap bulan. Tabungan tersebut tidak dilengkapi fasilitas kartu debit atau ATM (KR 26/7).

Setelah dilakukan audit internal, terungkap bahwa RL menerbitkan ATM sendiri tanpa sepengetahuan nasabah dan selanjutnya menguasai rekening nasabah dan mentransfer-nya ke rekening pribadi. RL juga mentransfer uang ke tabungan nasabah seolah-olah sebagai pembayaran bunga. Praktik ini sudah berjalan selama enam tahun, tanpa diketahui nasabah.

Audit bank tidak melakukan audit internal, bisa jadi perbuatan RL tak segera terungkap, namun pada saatnya pasti terbongkar karena nasabah dirugikan. Modus yang dilancarkan RL mungkin tak membuat nasabah curiga, apalagi ia seorang teller. Mengapa nasabah tertarik untuk mengikuti program tersebut? Tak lain karena bunga yang ditawarkan cukup tinggi berkisar 1,5 persen perbulan. Nasabah tidak curiga lantaran telah mendapatkan kiriman uang yang seolah-olah sebagai bunga tabungan. Padahal, itu hanyalah trik pelaku untuk menanamkan kepercayaan nasabah.

Kita sepakat menyebut RL

sebagai oknum. Pertanyaannya, apakah ia melakukan praktik curang itu sendirian, atau ada yang membantu, atau paling tidak memberi kesempatan sehingga kecurangan itu berlangsung hingga enam tahun? Biarlah itu ranah penegak hukum, dalam hal ini Kejati DIY, untuk menjawabnya.

Kita mengapresiasi pihak bank yang telah melakukan audit internal dan melaporkan kejanggalan itu kepada aparat penegak hukum, hingga menangkap RL. Ini artinya bank BUMN tersebut punya itikad baik untuk membersihkan institusinya dari pelbagai tindakan curang yang dilakukan oknum hingga merugikan nasabah.

Sementara bagi nasabah, hal paling utama dalam merespons kasus tersebut adalah uangnya kembali. Mereka telah dirugikan atas ulah RL yang mengatasnamakan institusi bank, padahal yang dilakukannya bersifat mandiri. Kalaupun tindakan RL masuk kualifikasi korupsi, tetap harus dipertimbangkan agar nasabah mendapatkan haknya. Sebab, dalam berbagai kasus, negara dapat menyita uang yang diduga hasil korupsi. Bila uang disita negara, nasabah tetap dirugikan bila uang tersebut tidak kembali kepada mereka.

Dalam kaitan itulah kita mendorong penyelesaian yang adil dan proporsional. Para nasabah yang telah dirugikan atas perbuatan RL harus mendapatkan haknya, minimal uangnya kembali. Kasus ini tentu menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, untuk lebih berhati-hati ketika hendak melakukan investasi. Harus ada kroscek apakah benar bank mengeluarkan produk baru tabungan atau investasi, semua dapat dicek dan ditelusuri lewat institusi resmi. □-d

Selamatkan Sungai dari Sampah

SEJAK tahun 2011 Pemerintah menetapkan 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional. Tujuannya, agar adanya momentum yang dapat dijadikan untuk mengingatkan kembali semua pihak bahwa betapa pentingnya sungai bagi kehidupan. Melalui peringatan kampanye khusus ini diharapkan masyarakat Indonesia selalu sadar akan pentingnya sungai bagi kehidupan.

Catatan rimba.com (2023) menyebutkan ada tiga alasan yang melatarbelakangi peringatan ini. *Pertama*, Indonesia memiliki ribuan sungai yang sangat berguna bagi kehidupan makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. *Kedua*, sejak ribuan tahun yang lalu, manusia memilih membangun pemukiman di dekat sungai karena air merupakan sumber kehidupan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. *Ketiga*, kesadaran pelestarian sungai masih rendah.

Meski telah memahami dan mengerti akan pentingnya fungsi air dan sungai bagi kehidupan, namun kesadaran melestarikan dan menjaga kondisi sungai oleh masyarakat di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang membuang sampah di sungai, sehingga menyebabkan sungai tercemar dan berbahaya bagi kehidupan.

Tercemar Berat

Pencemaran sungai tidak hanya merugikan manusia saja, namun satwa dan tumbuhan yang hidup di sungai dan sekitar sungai pun terancam dan punah. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2020) ada sekitar 59% sungai di Indonesia dalam kondisi tercemar berat, 26,6% sedang dan ringan 8,9%. Sedangkan secara spasial wilayah yang terdampak pencemaran sungai berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), terdapat 10.683 desa atau kelurahan. Sebanyak 6.160 desa atau kelurahan mengalami pencemaran air dari limbah rumah tangga. Sementara 4.496 desa

Alimansyah

atau kelurahan mengalami pencemaran dari limbah pabrik dan 27 desa atau kelurahan dari sumber lainnya.

Pencemaran sungai juga terjadi di DIY. Seperti di kota Yogyakarta, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta 2023 bahwa tingkat pencemaran di semua sungai di Kota Yogyakarta



KR-JOKO SANTOSO

sudah melampaui ambang batas. Sungai tersebut yaitu Sungai Code, Winongo, Gajahwong dan Sungai Manunggal. Salah satu sebab pencemaran sungai yaitu masih banyaknya limbah rumah tangga warga di bantaran sungai yang membuang langsung ke sungai, selain dari (hulu) juga sudah mulai tercemar.

Panggunharjo

Karena sungai membentang dari hulu sampai hilir dan melewati berbagai wilayah administrasi antardaerah provinsi, kabupatn atau kota serta penyebabnya yang beragam. Maka untuk mengatasi permasalahan pencemaran sungai tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah saja.

Solusi pengelolaan sampah mandiri mu-

lai tingkat hulu oleh warga seperti yang dilakukan di Desa Panggunharjo Bantul DIY. Desa yang memanfaatkan teknologi informasi dan metode 3R, *reuse, reduce* dan *recycle* merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah yang dapat menjadi berkah. Ini patut diapresiasi dan diduplikasi terutama bagi desa dan kelurahan yang berada di bantaran sungai. Sehingga dapat menyelesaikan sumber masalah sampah dari hulu dengan zero sampah anorganik.

Selain itu limbah industri yang dihasilkan swasta dapat diselesaikan swasta dengan pengelolaan secara mandiri dan berkontribusi melalui program *corporate social responsibility* (CSR) dan saluran Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang belum terjangkau secara maksimal dan terpusat harus ditangani segera oleh pemerintah. Semoga riuhnya manajemen sampah akhri-akhri ini karena penutupan sementara TPA Piyungan tidak membuat warga semakin banyak membuang sampah ke sungai.

Sebaliknya dapat menjadi titik balik optimalisasi pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai hilir yang menjadi tanggung jawab pemerintah jangka panjang untuk menghadirkan teknologi pemusnahan sampah. Sehingga sampah tidak menjadi masalah sebaliknya menjadi berkah. □-d

**) Alimansyah, Mahasiswa Doktoral Manajemen & Kebijakan Publik UGM, Dosen Administrasi Publik Universitas Bengkulu*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-copy identitas. Terimakasih.

Mewujudkan Jogja 'Smart Province'

GUBERNUR DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Yogyakarta telah memiliki Program Jogja *Smart Province* (JSP) sejak 2017. Merujuk pada Visi dan Misi Gubernur DIY tahun 2023-2027, Program JSP tersebut dilanjutkan dengan percepatan transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berfokus pada harmonisasi manusia dengan teknologi. Program tersebut antara lain *security operation center*, Jaringan Intepemerintah Daerah serta Layanan Publik Terintegrasi. Karenanya, DIY terpilih sebagai proyek percontohan implementasi provinsi cerdas pada tahun 2023 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KR, 13/7).

Smart Province merupakan tindak lanjut pembangunan *smart city*, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP). *Smart province* adalah provinsi yang mengembangkan dan mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Teknologi diharapkan mampu mendukung pengembangan provinsi tanpa mengurangi esensi kearifan lokal yang ada.

Proyek Percontohan

Terpilihnya DIY sebagai proyek percontohan tentu merupakan prestasi luar biasa. Mengingat hanya provinsi yang memenuhi kualifikasi yang dapat dijadikan percontohan. Untuk ditetapkan sebagai proyek percontohan minimal 80% Kabupaten/Kota sudah memiliki *master plan smart city*. DIY sendiri telah sampai pada pencapaian 100%, karena seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki *master plan smart city*. Hal tersebut membuktikan bahwa DIY layak menjadi percontohan *smart province*.

Smart province berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata prioritas. Terdapat 6 dimensi terpadu yang perlu

Iis Suwartini

diterapkan dalam perencanaan di kawasan wisata prioritas di antaranya: (1) *Smart environment* terkait kawasan wisata prioritas yang menekankan pada kebersihan, kesehatan dan tradisi. (2) *Smart economy* wujud implementasi TIK dalam proses transaksi (*cashless*) berlangsung di kawasan wisata prioritas. (3) *Smart branding* strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kunjungan wisata prioritas. (4) *Smart government* strategi pemerintah daerah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada kawasan wisata prioritas. (5) *Smart society* optimalisasi peran masyarakat yang unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik. (6) *Smart living* menginisiasi wisata prioritas yang kondusif, aman, nyaman dan tenang seperti halnya penyediaan pelayanan transportasi. Hal tersebut tentu perlu dukungan berbagai pihak guna tercapainya *smart province*.

Kolaborasi

Untuk mewujudkan Jogja *Smart Province* perlu kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak. Pemerintah DIY menginisiasi terjalannya sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-DIY, akademisi, pelaku usaha dan media. Harapannya dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan sinergi yang didukung oleh sebuah sistem yang kuat dapat membantu percepatan Jogja *Smart Province*. Selain itu, juga diperlukan payung hukum atau perda agar Jogja *Smart Province* dapat berjalan sesuai rancangan.

Saat ini perkembangan teknologi di Yogyakarta sendiri sudah dapat berterima dimasyarakat. Salah satu contohnya pemanfaatan QRIS telah

digunakan masyarakat di berbagai pelosok seperti halnya pasar tradisional, toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, dan donasi. Belum lagi beberapa objek wisata kini sudah memberlakukan pemesanan tiket secara online. Hal tersebut membuktikan bahwa literasi digital warga di Yogyakarta sangat baik.

Masyarakat telah mampu beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan teknologi. Taknologi tidak lagi dianggap sebagai ancaman yang dapat menggerus nilai kearifan lokal yang ada. Berbagai objek wisata maupun UMKM telah menerapkan digital marketing. Pemanfaatan TIK terbukti mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Hal tersebut mendukung misi transformasi digital yang meliputi infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. □-d

**) Iis Suwartini MPd, Dosen PBSI Universitas Ahmad Dahlan mahasiswa S3 UNS.*

Pojok KR

Tawarkan investasi fiktif, mantan teller bank BUMN raup Rp 5,6 m.

-- Masyarakat butuh literasi investasi sehat.

Persiapan transisi, TPS Cangkringan dilapisi geomembran.

-- Tak cemari lingkungan, warga tak usah khawatir.

Pengamat UGM usul sampah berbayar atasi masalah.

-- Pun belum tentu tuntas.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA

✉ pikiranpembaca@gmail.com ☎ 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Awas, Sungai akan Penuh Sampah

DARURAT sampah lagi kembali di Yogyakarta, setelah TPS Piyungan dinyatakan ditutup. Ini bukan persoalan ringan, sebab produk sampah DIY ini ratusan ton setiap harinya. Meski sebenarnya masalah ini 5 tahun lalu sudah terjadi dipikirkan, toh nyatanya sekadar dipikirkan saja. Belum ada realisasinya, misalnya dengan mesin untuk membuat daur ulang rekayasa sampah.

Darurat sampah kali ini, mu-

dah-mudahan menjadi darurat sampah terakhir. Realisasi rencana harus dilakukan. Yang kita khawatirkan adalah masyarakat yang kemudian akan buang di sungai, got atau pinggir jalan. Maka Yogya akan penuh sampah. Jalanan akan dihiasi tumpukan sampah. Maka aparat harus memperhatikan masalah ini. □-d

**) Hadiyono SH, Jl Kalurang Km 9,4 Sleman.*

Tumpukan Sampah di Rumah Kos

GARA-GARA TPS Piyungan ditutup dalam waktu lama, sampah menjadi trending topic di Yogya. Hampir semua orang ketika bertemu pertanyaannya adalah : bagaimana nih soal sampah?

Yang aneh, di Condongcatur sudah ada kawasan yang seperti ini sudah beberapa hari sampah tidak diambil. Karena Sabtu (22/7) tampak tumpukan sampah di pinggir

rumah, di sebuah rumah kos. Entahlah apakah setelah mulai Minggu (23/7) tidak ada pengambilan sampah tempat tersebut semakin menggunung sampahnya. Mungkin pemilik kos perlu mengingatkan soal sampah dan anak kos juga perlu peduli sampah dan lingkungannya. Tentu demi kebaikan Bersama. □-d

**) Monik, Condongcatur Sleman*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efly Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSh, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)